



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LISMAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 797891

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.630.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1002 m2/264 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
4. Tanah Seluas 1120 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **117.600.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **12.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	776.436.522
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.536.036.522
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.506.036.522

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.